

---

# Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung

**Yulia Neta M.**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung**

## **Abstract**

Purpose of research is to analyze Lampung Province Local Regulation Nomor 4/1992 regarding position of contribution revenue from third party to province local financial. Result of this research showed position of contribution revenue from third party to local financial are as financial state in sence the revenue enter Lampung province local treasury. The Implementation have been decided by making memorandum of Understanding (MOU), and then continued by making contract or other agreement or Preliminary contract among parties, finalized by Decision of Lampung Governor. After than contributors directly deposit the contributions to province Treasury, in this case is Appointee Bank.

**Kata kunci:** keuangan daerah, sumbangan pihak ketiga, otonomi daerah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Kedudukan sumbangan pihak ketiga terhadap keuangan daerah. Faktor Penghambat dan pendukung Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah sebagai keuangan Negara dalam arti penerimaannya masuk ke dalam kas daerah dan dicantumkan dalam APBD. Mekanisme pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah di Propinsi Lampung telah ditetapkan, yaitu dengan didahului dengan *Memorandum of Understanding* (MOU), kemudian dilanjutkan untuk membuat kontrak atau kesepakatan lain atau kontrak pendahuluan (*Preliminary contract*) antara pihak-pihak, dan demi kepastian hukum di tindaklanjuti dengan keputusan Gubernur Lampung. Setelah itu pihak penyumbang langsung menyetorkan sumbangannya ke kas daerah, yaitu Bank yang ditunjuk.

## **I. PENDAHULUAN**

Diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33



Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah, telah meletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Otonomi Daerah diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi daerah dan keanekaragaman daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka sumber pendapatan daerah terdiri dari atas:

1. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang menurut pasal 164 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Setelah UU Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dan diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah pada Bab VIII Mengenai Keuangan Daerah, walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Sumber Pendapatan Daerah, namun dalam Pasal 157 bagian c menyebutkan lain-lain pendapatan yang sah, yang menurut pasal 164 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka sumbangan pihak ketiga kepada daerah termasuk lain-lain pendapatan daerah yang ditetapkan pemerintah.



Berdasarkan penjelasan di atas maka, penerimaan pendapatan daerah berupa sumbangan pihak ketiga merupakan sumber penerimaan yang sah dan dapat dibenarkan melalui tiga sudut pandang sebagai berikut:

1. Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh daerah adalah keleluasaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kewenangan otonomi tersebut diselenggarakan berdasarkan pada kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Selanjutnya wujud penyelenggaraannya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Khusus di bidang penerimaan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif dibiayai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat diukur akuntabilitas dan *acceptable* (dapat diterima oleh masyarakat).
3. Dalam sumbangan pihak ketiga melekat unsur-unsur hubungan yang tidak menekan antara yang menerima sumbangan dan yang memberikan sumbangan, karena hal tersebut dilaksanakan secara sukarela, tidak mengikat dan perolehannya oleh pihak ketiga tersebut dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dijadikan dasar dalam penetapan APBD, berprinsip kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan, transparansi dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman sumber pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga harus didasarkan kepada kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sumbangan pihak ketiga dimaksudkan sebagai pemberian pihak ketiga kepada daerah secara sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik



Tabel 1. Dasar Hukum Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

Dasar hukum penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah	Frekuensi	Persentase
a. Setuju	14	70
b. Tidak Setuju	6	30
Jumlah	20	100

Sumber : Penelitian Lapangan, 2005

yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, dan Pemberian sumbangan pihak ketiga tersebut tidak menghilangkan/mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya karena sumbangan bersifat sukarela, maka dalam pelak-sanaannya tidak boleh berakibat menghambat laju perkembangan ekonomi daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada latar belakang pemikiran di atas dan melihat betapa besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan demi lancarnya pembangunan di daerah khususnya di Propinsi Lampung, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan sumbangan pihak ketiga terhadap keuangan daerah Propinsi Lampung?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tersurat maupun yang tersirat, konsep-konsep, pandangan, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

**Tabel 2. Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Keuangan Daerah**

Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap keuangan daerah	Frekuensi	Persentase
a. sebagai keuangan daerah	14	70
b. sebagai sumbangan sukarela	4	20
c. sebagai dana pendamping	2	10
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber : Penelitian Lapangan, 2005

cara melihat langsung bagaimana bahan-bahan hukum yang mengatur kewenangan daerah tentang kedudukan sumbangan pihak ketiga terhadap keuangan daerah dilaksanakan di Propinsi Lampung. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dan kemudian data dianalisis secara kualitatif serta diberikan penjelasan-penjelasan secara rinci mengenai makna data (deskriptif analitis).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Hukum Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

Sumbangan Pihak Ketiga mempunyai dasar hukum Perda Nomor 4 Tahun 1992 sebagai aplikasi dari UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah. Setelah UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Didaerah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti kembali dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kelanjutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka secara otomatis seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dan masih mendasarkan kepada UU No. 5 Tahun 1974 adalah batal demi hukum, termasuk dalam hal ini Perda No.4 Tahun 1992. Namun demikian merujuk dari ketentuan Peralihan pada UU No. 22 Tahun 1999 bab XV pasal 137, selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Pasal 79 huruf d UU No. 22 Tahun 1999 ini maka seluruh



**Tabel 3. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga**

Mekanisme pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga	Frekuensi	Persentase
a. Ada	18	90
b. Tidak ada	2	10
Jumlah	20	100

*Sumber: Penelitian Lapangan, 2005*

instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Demikian juga halnya setelah UU No.22 Tahun 1999 ini diganti dan diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka dalam ketentuan penutup pasal 238 ayat (1) menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Oleh sebab itu agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah kekosongan hukum dalam melaksanakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, maka Pemerintah Propinsi Lampung yang disetujui oleh lembaga legislatif daerah (DPRD) tetap membenarkan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah tersebut masih berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1992.

Untuk mengetahui keberlakuan dan Dasar Hukum Perda No. 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di propinsi Lampung, dapat dilihat dari variasi jawaban responden sebagaimana yang tertuang dalam tabel frekuensi dan persentase (Tabel 1.)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa menurut variasi jawaban yang diberikan oleh sejumlah 20 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ternyata sebagian besar yaitu sekitar 70 % menyatakan setuju bahwa Dasar Hukum Perda Nomor 4 Tahun 1992 masih berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 1974. Sedangkan lainnya sekitar 30 % menyatakan tidak setuju.

Dengan demikian maka secara umum dapat dikatakan bahwa Dasar Hukum Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Propinsi



Lampung berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 masih disetujui. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa melihat dari ketentuan Peralihan UU No. 22 Tahun 1999 dan Ketentuan penutup pada pasal 238 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004. Selain itu agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah kekosongan hukum dalam Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Khususnya di Propinsi Lampung.

Hal ini sesuai juga dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Syaifullah Sesunan S.H, M.H (Kepala Biro Hukum Propinsi Lampung), Ibu Suresmi Ramli, S.E (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung), Bapak Harun Al Rasyid (Kepala Sub Dinas Penerimaan Lain-lain Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung), dan Bapak Wan Effendi, S.H (Dispenda). Menerangkan bahwa keberlakuan Perda No. 4/1992 yang berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 tersebut selain melihat dari Ketentuan Peralihan UU No. 22 tahun 1999 dan Ketentuan Penutup pasal 238 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 oleh Pemerintah Pusat, juga agar Sumber Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya, juga lebih didasarkan oleh pertimbangan bahwa diadakannya dan diberlakukannya Perda tersebut baik di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang masih relevan dengan keadaan pemerintah daerah, pertimbangan dan masukan dari masyarakat akan manfaat penerimaan tersebut bagi Pendapatan Daerah serta ditinjau dari aspek hukumnya.

Oleh sebab itu maka Pemerintah Propinsi Lampung yang disetujui Lembaga Legislatif Daerah (DPRD) tetap membenarkan Penerimaan dari Sumbangan Pihak ketiga tersebut masih berdasarkan pada Perda No. 4 Tahun 1992, karena ternyata sampai dengan sekarang penerimaan dari sumbangan pihak ketiga tersebut masih ditetapkan dalam setiap APBD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sedangkan Proses perubahannya dari Perda No. 4 Tahun 1992 yang akan disesuaikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 saat ini masih dalam tahap persiapan di tingkat Eksekutif, sementara belum diajukan ke tingkat Legislatif, mengingat pembahasan di tingkat Legislatif memerlukan waktu yang tepat.



---

## **B. Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah di Propinsi Lampung**

Kedudukan sumbangan pihak ketiga terhadap keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di Propinsi Lampung, dapat dilihat dari variasi jawaban responden sebagai mana yang tertuang dalam tabel frekuensi dan persentase (Tabel 2.)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa menurut variasi jawaban yang diberikan oleh sejumlah 20 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ternyata sebagian besar yaitu sekitar 14 responden (70%) menyatakan kedudukan penerimaan sumbangan pihak ketiga terhadap keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai keuangan daerah, sedangkan lainnya sekitar 4 responden (20%) menyatakan sebagai sumbangan sukarela dan hanya sekitar 2 responden (10%) saja yang menyatakan sebagai dana pendamping.

Berdasarkan variasi jawaban responden di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa memang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah mempunyai kedudukan sebagai keuangan daerah dan berperanan sangat penting dalam kelancaran pembangunan di Propinsi Lampung. Hal ini disebabkan pendapatan yang diperoleh dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga merupakan tambahan devisa tersendiri, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya termasuk sektor perekonomian daerah, oleh karena itu sumbangan pihak ketiga harus digalakkan dan lebih ditingkatkan, karena penerimaan sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mendorong inovasi dan kreasi untuk secara kompetitif mengembangkan sumber daya yang ada, agar daerah dapat membangkitkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

Hasil temuan di lapangan dan sesuai dengan apa yang dikemukakan dari hasil wawancara kepada Bapak Syaifullah Sesunan, S.H, M.H. (Kepala Biro Hukum Propinsi Lampung), Ibu Suresmi Ramli S.E (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung) dan Bapak Wan



Effenddi, S.H (Dispenda), yang menyatakan bahwa hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian disimpan dalam kas daerah dan dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu dipergunakan untuk kepentingan daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut dalam pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat banyak dan harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian bagi daerah dan masyarakat. Penerimaan sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada daerah dalam rangka perjanjian/kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemerintah daerah dan pihak ketiga pemberi sumbangan. Perjanjian atau kerjasama dimaksud yaitu pihak ketiga memberikan sumbangan kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak. Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud di atas adalah dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah mempunyai kedudukan sebagai keuangan Negara yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarmin yang dikutip oleh Abu Daut Busroh yang mengatakan bahwa, Keuangan Negara mencakup:

1. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, terdiri dari
  - a. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - b. APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



2. Kekayaan Negara yang dipisahkan, yang dikategorikan kekayaan negara ini adalah:

kekayaan negara yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kekayaan negara yang disertakan dalam perusahaan-perusahaan swasta, yaitu Perusahaan Jawatan, PERTAMINA, Perusahaan Daerah, PT yang sahamnya sebagian milik negara dan sebagian milik BUMN.

Didukung juga oleh Arifin P. Soeria Atmadja, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara diklasifikasikan menjadi:

1. Keuangan Negara dalam arti luas meliputi:

- (a) APBN
- (b) APBD
- (c) Unit-unit Usaha Milik Negara
- (d) dan hakekat seluruh kekayaan negara

2. Keuangan Negara dalam arti sempit, yaitu APBN.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan keuangan negara, dan oleh sebab itu pelaksanaannya dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana keuangan negara paling tidak mendekati dan mengikuti paradigma baru yang berkembang dalam pengelolaan keuangan modern yang dapat diterapkan (*applicable*) oleh Pemerintah Daerah. Perubahan paradigma ini sering disebut dengan konsep *good government* dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan publik yaitu: transparansi, efisiensi, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Bentuk penilaian pertanggung-jawaban keuangan daerah (negara) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat dua bentuk penilaian yaitu:

*Pertama*, Laporan pertanggung jawaban terhadap seluruh pengelolaan keuangan daerah penerimaan dan pengeluaran atas APBD.

*Kedua*, pertanggungjawaban atas kinerja keuangan daerah atau APBD (*budget performing*) dari sisi efisiensi dan efektifitas.



### **C. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Lampung**

Bagaimana mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, dapat dilihat dari variasi jawaban yang diberikan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai mana terangkum dalam Tabel 3.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa menurut variasi jawaban yang diberikan oleh sejumlah 20 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ternyata sebagian besar yaitu sekitar 90 % menyatakan bahwa selama ini ada mekanisme yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Sedangkan lainnya sekitar 10 % menyatakan tidak ada acuan dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Berdasarkan kenyataan di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan acuan bagaimana mekanisme pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilaksanakan. Mekanisme tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Harun Al Rasyid Kasubdin Penerimaan Lain-lain dan penjelasan dari Bapak Wan Effendi Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung, bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah terlebih dahulu harus disepakati dalam suatu naskah kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), yaitu sebuah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak selaku penerima sumbangan dan penyumbang.

Para pihak dimaksud adalah Pemerintah Daerah selaku penerima sumbangan dan biasanya naskah kesepakatan tersebut diwakili dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam Jabatannya sebagai Gubernur Lampung bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Lampung, pihak ketiga selaku pemberi sumbangan dalam naskah kesepakatan tersebut diwakili dan ditandatangani oleh masing-masing pimpinan dari suatu badan hukum atau perorangan bertindak dan untuk atas nama masing-masing dari pihak ketiga.

Para pihak sepakat bahwa kontribusi yang diberikan pihak penyumbang kepada pemerintah daerah bukan merupakan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi atau pajak, akan tetapi merupakan pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Propinsi



Lampung, dan untuk memenuhi aspek legalitas, akuntabilitas dan audibilitas dalam pelaksanaan kesepakatan ini, para pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disetujui bersama antara kedua belah pihak.

MoU ini adalah suatu pemahaman awal dari pihak-pihak yang merencanakan untuk membuat kontrak atau kesepakatan lain atau disebut juga dengan kata lain kontrak pedahuluan (*preliminary contract*). MoU muncul setelah adanya negosiasi atau proses perundingan (*bargaining proses*). MoU bukanlah suatu kontrak, maka walaupun dapat dilaksanakan namun bila dilanggar, kekuatan sanksinya bukan hukum melainkan moral.

MoU tidak mengenal bentuk formal/baku. Agar dapat mencegah penipuan/kecurangan, maka MoU memuat substansi rumusan pokok masalah/bahasan, persyaratan pokok, tandatangan dari pihak yang akan melaksanakan dan identitas pihak-pihak.

Mekanisme pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Propinsi Lampung kemudian dilanjutkan pada pihak penyumbang langsung menyetorkan sumbangannya ke Kas Daerah yaitu Bank yang ditunjuk Pemerintah Propinsi Lampung dan telah ditentukan ayat penerimanya. Penyetoran atau pembayaran dapat dilakukan setiap bulan atau setiap akhir tahun atau sesuai dengan kesepakatan dan langsung ke Kas Daerah yang telah ditentukan ayatnya atau disetorkan melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung, masa berlakunya tidak lebih dari satu tahun karena ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.

Berdasarkan data di lapangan dan sesuai juga dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Wan Effendi bahwa, mekanisme pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur (SK. Gubernur) Propinsi Lampung maka secara teknis tatacara pemberian, pemungutan, dan penyetoran sumbangan pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut:

1. Sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Propinsi Lampung, dibayarkan/disetorkan langsung oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Propinsi Lampung melalui pembantu pemegang



- kas dan atau petugas yang ditunjuk pada unit kerja pelaksana di bawah koordinasi Dinas masing-masing.
2. Hasil penerimaan sumbangan dimaksud, oleh pembantu pemegang kas dan atau petugas yang ditunjuk disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pembantu pemegang Kas dan atau Petugas yang ditunjuk, melakukan pencatatan, pembukuan dan penatausahaan penerimaan dimaksud.
  4. Kepala Kantor dari pihak penyumbang melaporkan hasil penerimaan sumbangan dimaksud setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

**D. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah di Propinsi Lampung**

Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui adanya beberapa hambatan bagi Dinas Pendapatan Daerah di Propinsi Lampung dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan dari sektor sumbangan pihak ketiga kepada daerah, hambatan-hambatan itu antara lain:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada daerah, khususnya di Propinsi Lampung.
2. Rendahnya kemampuan dan kemauan Pemerintah Daerah untuk menggali potensi daerah dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang bagi peningkatan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
4. Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari sumbangan pihak ketiga ini ke Kas Daerah.
5. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi peranan sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk menunjang pelayanan masyarakat dan pembangunan di Propinsi Lampung.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas maka, Pemerintah Daerah dalam hal ini khususnya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung dapat melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan dan meningkatkan penanganan yang lebih intensif lagi agar sektor penerimaan dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mengembangkan sektor-sektor lainnya



demikian kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat di Propinsi Lampung.

#### **E. Faktor Pendukung Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah di Propinsi Lampung.**

Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan di Propinsi Lampung, antara lain:

1. Besarnya potensi daerah yang dapat digali sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Banyaknya perusahaan daerah yang dapat dijadikan donatur untuk memberikan sumbangan kepada daerah.
3. Diserahkannya pengelolaan dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa faktor pendukung utama pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga terhadap daerah di Propinsi Lampung adalah, besarnya potensi daerah yang dapat digali sebagai sumber pendapatan daerah, di samping itu banyaknya perusahaan yang dapat dijadikan donatur untuk memberikan sumbangan kepada daerah.

#### **IV. PENUTUP**

1. Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Propinsi Lampung mempunyai dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1992. Selanjutnya Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tersebut telah diatur secara jelas yaitu didahului dengan sebuah naskah kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak dalam bentuk nota kesepakatan atau yang disebut *Memorandum of Understanding* (MoU), MoU adalah suatu pemahaman awal dari pihak-pihak yang merencanakan untuk membuat kontrak atau kesepakatan lain atau disebut juga dengan kata lain Kontrak Pendahuluan (*preliminary contract*) dan demi kepastian hukum



- ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Lampung. Selanjutnya pihak penyumbang langsung menyetorkan sumbangannya ke Kas Daerah yaitu Bank yang ditunjuk Pemerintah Propinsi Lampung.
2. Faktor penghambat pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah antara lain: Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada daerah di Propinsi Lampung; Rendahnya kemampuan dan kemauan Pemerintah Daerah untuk menggali potensi daerah dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah; Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang bagi peningkatan sumbangan pihak ketiga kepada daerah; Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari sumbangan pihak ketiga ini ke Kas Daerah; Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi peranan sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk menunjang pelayanan masyarakat dan pembangunan.
  3. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah antara lain adalah: Besarnya potensi daerah yang dapat digali sebagai sumber pendapatan daerah; Banyaknya perusahaan yang dapat dijadikan donatur untuk memberi sumbangan kepada daerah; Diserahkannya pengelolaan dari sektor sumbangan pihak ketiga kepada daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu mengefektifkan dan mensosialisasikan secara berkesinambungan peningkatan partisipasi masyarakat dan aparat dalam mengupayakan peningkatan sumbangan pihak ketiga kepada daerah demi kelancaran pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di Propinsi Lampung.
2. Perlu meningkatkan kesadaran tentang kemampuan dan kemauan aparat untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki Propinsi Lampung.



---

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mustari, H. Andi. 1999. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Radjab, Dasril, 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiscal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Widjaya, A.W.. 1998. *Titik Berat Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah